

**POTENSI KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
DALAM MENGATASI KEMISKINAN
DI DESA PESISIR**

Karya Ilmiah

Oleh :

Mardiana, S.E



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI
M E D A N
2 0 0 2**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Kemiskinan masyarakat peisir pantai sudah menjadi pemahaman umum. Namun tidak sedikit dijumpai potensi-potensi yang mereka miliki. Selain sumberdaya yang melimpah, sumberdaya manusia, juga kekompakan masyarakat desa pesisir merupakan hal yang patut untuk digali. Kelompok swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat (Pokmas) merupakan wahana bagi para nelayan dan masyarakat lainnya di daerah pesisir untuk mencapai suatu tujuan. Seperti kelompok pengajian, industri kecil dan nelayan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna, mengingat banyaknya keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan sumbang saran dari pembaca sekalian untuk perbaikan selanjutnya.

Medan, Oktober 2002

Penulis

Mardiana, S.E

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Studi	5
1.3 Manfaat Studi	5
1.4 Ruang Lingkup Studi	6
1.5 Analisis Studi	6
II. PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR	8
2.1 Konsep Pembangunan	8
2.2 Pembangunan Wilayah Pesisir	9
2.3 Kemiskinan Penduduk Pedesaan	13
2.4 Pemberdayaan Masyarakat	16
2.5 Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa	19
III. DESKRIPSI DAERAH STUDI	
3.1 Geografis Kabupaten Langkat	23
3.2 Perekonomian Kabupaten Langkat	25
3.3 Kecamatan Berandan Barat	27
IV. DINAMIKA KELOMPOK MASYARAKAT	33
4.1 Potensi Kelompok Masyarakat	33
4.2 Keberadaan Kelompok Masyarakat	34
4.3 Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan	36
4.4 Kebijakan Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Nelayan	37
V. PENUTUP	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Rekomendasi	43
DAFTAR KEPUSTAKAAN	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luas wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan yaitu sekitar 5,8 juta Km² dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 Km² dan terdiri dari 17.508 pulau. Laut menyimpan potensi pembangunan yang sangat besar, baik sumberdaya alam hayati dan non-hayati.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka semakin nyata arah kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 10 UU No.22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan.

Luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah membawa konsekwensi bagi daerah untuk dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin bertambah dan beragam.

Sumatera Utara mempunyai panjang pantai sekitar 1.300 km, yang terdiri dari Pantai Timur sepanjang sekitar 545 km dan Pantai Barat sekitar 375 km, serta pantai Pulau-pulau Batu Nias sekitar 380 km. Nelayan di Sumatera Utara sebanyak 118.486 keluarga, dengan jumlah armada pendukung pengangkapan ikan 27.727 unit yang sebagian besar merupakan perahu tanpa motor.

Secara umum masyarakat pesisir/pantai yang disebut sebagai nelayan adalah merupakan masyarakat yang lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Nelayan juga merupakan bagian terdepan dari kemiskinan dan keterbelangan ekonomi dan pendidikan. Secara ekonomi pendapatan perkapita nelayan masih sangat rendah. Banyak hal yang menyebabkannya diantaranya karena lemahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan masyarakat di pesisir pantai, pemerintah telah melaksanakan motorisasi perahu-perahu nelayan melalui pemberian bantuan kredit pemilikan perahu motor yang dituangkan dalam Kepres No. 39 tahun 1980. Namun bantuan tersebut tidak dilengkapi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat secara lebih luas, yang mengakibatkan bantuan yang telah diberikan tidak begitu besar manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip pemberdayaan yang perlu dikembangkan tidak hanya bersifat *incremental* yang hanya meningkat sedikit demi sedikit, melainkan perlu dilakukan *big push* dan komprehensif dengan dukungan semua pihak. Agar pemberdayaan yang bersifat dapat dinikmati oleh masyarakat luas, maka perlu dilakukan perubahan paradigma dari stakeholders menjadi shareholders di mana masyarakat menjadi pemilik dan penerima hasil. Prinsip pepatah "Jangan beri ikan, tetapi berilah kail" sudah tidak lagi dapat dilaksanakan dewasa ini. Paradigma yang harus dikembangkan adalah memberikan saluran bagi kail yang dimiliki dan ikan yang dihasilkan oleh masyarakat.

Paradigma baru dalam pembangunan yang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 adalah memberikan titik tolak pembangunan dari masyarakat. Pembangunan yang berpusat di masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adil dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri dapat dipertahankan. Pembangunan yang berpusat pada masyarakat mengutamakan keswadayaan masyarakat.

Pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat guna memperkuat potensi ekonomi mereka melalui peningkatan taraf pengetahuan, kesehatan dan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. Mengembangkan ekonomi masyarakat juga dapat dilakukan dengan melindungi dari persaingan dalam proses mengembangkan prakarsanya.

Dalam struktur sosial masyarakat, komunitas nelayan di desa diidentifikasi sebagai kelompok masyarakat miskin. Banyak faktor yang menjadi penyebab. Namun, secara umum disebutkan keterbatasan sarana dan prasarana penduduk terhadap aktivitas sosial telah menyebabkan mereka menjadi tidak bisa leluasa dalam mengolah sumberdaya yang ada. Dengan tujuan untuk mengentaskan mereka dari kondisi kemiskinan yang selama ini mengekang, polarisasi pekerjaan nelayan perlu dilakukan dengan berbagai fasilitas pendukung yang dicanangkan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan tersebut, agar mereka dapat lebih makmur, dapat memenuhi kebutuhannya dan lebih meningkatkan kesejahteraannya.

Masyarakat di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sebagian besar merupakan nelayan tradisional yang umumnya memiliki alat tangkapan ikan yang sederhana yang tidak begitu produktif. Alat tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena potensi laut menghendaki jenis peralatan lain yang lebih efektif atau peralatan modern yang lebih membutuhkan modal besar.

Mereka yang berkerja sebagai buruh nelayan penghasilannya tidak memuaskan, karena posisi mereka yang lemah dalam negosiasi penetapan upah/pembagian hasil dengan majikan mereka yang merupakan pengusaha ekonomi kuat. Namun demikian penghasilan mereka relatif lebih stabil dibandingkan dengan nelayan tradisional.

Untuk meningkatkan penghasilan masyarakat setempat, usaha yang perlu dilakukan adalah dengan menciptakan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk mereka, baik langsung untuk kepala keluarga ataupun anggota keluarga, sehingga mereka mempunyai pendapatan pokok dan sampingan yang cukup menunjang peningkatan pendapatan keluarga.

Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan mengadakan pelatihan kepada warga masyarakat mengenai aspek usaha-usaha kecil. Hal ini tentunya dilakukan berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia baik dilihat dari jumlahnya, kualitasnya dan minat masyarakat. Selain itu dicarikan kelompok usaha menengah yang bersedia bertindak sebagai mitra usaha atau mendirikan usaha di Desa Perlis.

Sasaran pembangunan desa pantai adalah keterlibatan nelayan tradisional dalam produksi hasil laut dan pertambakan, agar perikanan rakyat memberikan kontribusi optimal berupa manfaat ekonomi terhadap

masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah. Upaya mencapai hasil optimal pembangunan desa pantai memerlukan pola rencana yang tepat sehingga jelas terlihat peningkatan potensi ekonomi maritim dikaitkan dengan pengembangan wilayah. Dengan dilakukannya pola pengembangan desa pantai, kehidupan ekonomi masyarakat di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan yang lainnya ikut akan terdorong. Untuk itu perlu dilakukan studi tentang pemberdayaan kelompok masyarakat desa pantai di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

1.2 Tujuan Studi

Studi ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengenalinya kendala yang dihadapi untuk mengatasi kemiskinan nelayan di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
2. Mengenalinya potensi kelompok masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
3. Mengetahui implikasi kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi hal tersebut.

1.3 Manfaat Studi

Hasil studi ini diharapkan akan memberikan manfaat :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai informasi untuk merencanakan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan desa pantai.

Polarisasi mata pencaharian nelayan meliputi pengetahuan nelayan tentang teknologi penangkapan ikan, peluang kerja selain nelayan, *ketersediaan modal, jumlah anggota keluarga yang dapat membantu kerja* dan pengetahuan tentang pengolahan hasil tangkapan.

Faktor-faktor internal yang mungkin menjadi hambatan dalam *polarisasi mata pencaharian nelayan seperti pendidikan, keterampilan, pengetahuan pemasaran, jenis pekerjaan dan jenis kelamin*. Faktor eksternal yang akan diuraikan sebagai penghambat menurut nelayan seperti kebijakan/perlindungan pemerintah, kebijakan kredit perbankan, dan keterlibatan organisasi KUD atau HNSI.

BAB II

PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR

2.1 Konsep Pembangunan

Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan. Pembangunan mempunyai 3 sifat penting, proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Rostow (dalam Jhingan, 1993. juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.

Todaro (1998) juga yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Menurut Hanafiah (1982) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang.

2.2 Pembangunan Wilayah Pesisir

Pengertian pembangunan wilayah menurut Sandy (1982) pada hakikatnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial wilayah tersebut serta tetap mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Menurut

Hadjisaroso (1994) pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan mengembangkan wilayah atau membangun daerah atau kawasan dalam rangka usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Sedangkan menurut Jayadinata (1992) mengemukakan pengembangan wilayah adalah memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada.

Pemerintah melakukan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan tersebut berlandaskan pada pengertian sebagai pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Suhardi, 1985)

Telah disadari bahwa negara mempunyai peranan yang sangat besar tidak hanya dalam konteks nasional tetapi juga tingkat pembangunan regional. Kebanyakan negara-negara berkembang mengikuti perkembangan yang sentralistik dalam pembangunan daerahnya. Dengan kata lain, pemerintah pusat menciptakan institusi di daerah dalam usaha mempertahankan kekuasaannya atau kewenangannya. Mereka juga memusatkan aktivitas perencanaan dalam rangka kepentingan nasional (Rondinelli dan Cheema, 1983 dalam Subhilhar, 1996).

Sasaran Pembangunan daerah harus diterjemahkan dari tujuan pembangunan nasional. Dimana tujuan pembangunan daerah harus konsisten dengan tujuan nasional yang umumnya terdiri atas :

- a. Mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cepat
- b. Menyediakan kesempatan kerja yang cukup.
- c. Pemerataan pendapatan.

- d. Mengurangi perbedaan antara tingkat pendapatan, kemakmuran, pembangunan serta kemampuan antar daerah
- e. Membangun struktur perekonomian agar tidak berat sebelah.

Pelaksanaan pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, harus berlandaskan pada prinsip pembangunan daerah. Dengan memperhatikan bahwa hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya maka dapat dipikirkan pendidikan sebagai strategi dasar pengembangan lingkungan wilayah pantai dengan pengertian pendidikan sebagai suatu proses untuk membuat seseorang mampu hidup dalam masyarakat (Hadjisaroso, 1994).

Pembangunan pedesaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan dalam menguasai lingkungan sosial, yang disertai dengan meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut (Inayatullah, 1977).

Konsep "Pengembangan Wilayah Pantai" mendasarkan diri bukan pada konsep wilayah nodal ataupun konsep wilayah perencanaan melainkan mendasarkan diri pada konsep wilayah homogen. Homogenitas ini diukur dengan tingkat pendapatan perkapita. Penentuan tingkat pendapatan perkapita diambil dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat nelayan pada umumnya (nelayan tradisional).

Wilayah pesisir/pantai adalah wilayah antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti

angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas. Batas wilayah pesisir kearah laut mencakup bagian atau batasan terluar dari daerah paparan benua, di mana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi oleh aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Pembangunan di wilayah pesisir ini sangat perlu direncanakan dengan baik karena merupakan wilayah yang unik yaitu pencampuran antara pengaruh darat dan laut (Saptarini, 1996).

Strategi pembangunan wilayah pantai secara berkelanjutan pada dasarnya merupakan strategi pembangunan yang mengacu pada suatu ambang batas yang luwes pada laju pemanfaatan ekosistem alami, serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Pembangunan wilayah pantai yang berkelanjutan adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alami yang sedemikian rupa sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia tidak rusak.

Sedikitnya ada tiga kunci strategis konsepsi pembangunan desa pantai. Pertama, kaitan lingkup kemakmuran yaitu 1) pembangunan manusia seutuhnya, 2) pembangunan desa/wilayah dan 3) pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Kedua, perencanaan pelaksanaan pembangunan yaitu warga desa dan orang luar desa yang mewakili unsur birokrat, teknokrat dan sukarelawan. Ketiga, perencanaan yang terpadu yaitu keterpaduan antara *bottom up* dengan *top down* (Darus, 1997).

Pembangunan yang dilakukan sejak pemerintahan orde baru ternyata telah menempatkan negara pada posisi yang dominan dalam proses pembangunan. Di pedesaan, banyak program pembangunan yang

dilakukan dengan pendekatan teknokratis yang bersifat *top down*. Contohnya menurut Hardjono (1983, dalam Alfitri, 1993) pembangunan pertanian melalui "revolusi hijau" yang ditujukan untuk mencapai swasembada beras. Program seperti Bimas, Inmas, Insus dan berbagai institusi lain yang menyertainya seperti BUUD dan kemudian KUD dari semula tergantung langsung pada intervensi pemerintah (Alfitri, 1993).

Pembangunan pedesaan yang mendasarkan diri pada keswadayaan menurut Ismawan (1992) dapat dilihat sebagai jalan keluar untuk meningkatkan partisipasi wong cilik dalam pembangunan. Keswadayaan akan lebih efektif kalau masyarakat mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

2.3 Kemiskinan Penduduk Pedesaan

Kartasamita (1996) mengungkapkan bahwa kemiskinan sekurang-kurangnya disebabkan oleh empat penyebab. Pertama rendahnya pendidikan, kedua rendahnya derajat kesehatan, ketiga terbatasnya lapangan kerja, dan keempat kondisi keterisoliran. Keempat penyebab di atas menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan.

Soedjito (1987) juga mengemukakan tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan masyarakat. Dalam membangun pedesaan menunjukkan bahwa banyak kendala utamanya terletak pada terbatasnya dana masyarakat, akibat kemiskinan, dan tenaga kerja termasuk anak-anak usia sekolah lebih banyak dicurahkan pada kegiatan ekonomi produktif.

Siasat baru dalam pembangunan harus menolak jalan pikiran bahwa kemiskinan dapat diperangi secara tidak langsung melalui laju pertumbuhan yang akan terus merembes ke rakyat banyak melalui tricle down effect. Titik tolaknya haruslah dengan pemikiran bahwa kemiskinan harus langsung diserang (Haq, 1983).

Bryant dan White (1982) menyatakan salah satu cara untuk memberikan peran kepada si miskin dalam proses pembanguann adalah dengan penumbuhan kuasa dan wewenang (*empowering*). Perlu teknik-teknik sosial dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu dengan mengutamakan bentuk-betuk organisasi swadaya. Korten (1983) menyebut organisasi swadaya ini sebagai struktur penengah.

Keswadayaan bisa dipahami sebagai "semangat" yakni upaya yang didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri dan berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki. Keswadayaan juga berarti semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas (Raharjo, 1992).

Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada asumsi bahwa kemiskinan merupakan fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya penguasaan terhadap sumberdaya. Padahal sebenarnya fenomena kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Masalah kemiskinan ditandai oleh banyak faktor, misalnya ; kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, kondisi fisik yang lemah akibat kurangnya gizi, tingginya ketergantungan mereka, dan terefkesikannya dalam budaya

kemiskinan yang digariskan satu generasi ke generasi berikutnya (Tjokrowinoto, 1993).

Kondisi di atas terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Orang miskin adalah orang yang serba kurang mampu dan terbelit dalam lingkaran ketidakberdayaan (Tjokrowinoto, 1993).

Upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di pedesaan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat ini dimulai dari perumusan persoalan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan dan penilaian keberhasilan pembangunan. Dengan partisipasi ini diharapkan masyarakat pada akhirnya memiliki kemampuan membangun dirinya sendiri dan lingkungannya secara swadaya dan berkelanjutan.

Untuk menanggulangi kemiskinan, Kartasasmita (1996) menyebutkan perlunya memperhatikan tantangan, modal dan potensi yang ada. Tiga arah kebijakan yang dapat dilakukan adalah *pertama*, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; *kedua*, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan *ketiga*, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, serta sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk penanggulangan kemiskinan.

Swadaya masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki. Swadaya masyarakat juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Rahardjo, 1992).

Menurut Chambers (1983), kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang sederhana. Kemiskinan berakar dalam berbagai faktor internal yang melekat pada diri orang miskin itu sendiri seperti ketidakberdayaan, kerawanan, kelemahan fisik, isolasi dan kemiskinan itu sendiri, dan dapat pula merupakan sesuatu yang bersifat eksternal seperti kebijaksanaan pembangunan yang lebih mendukung perkembangan lapisan masyarakat ekonomi kuat ketimbang lapisan masyarakat lemah. Menurut Soetrisno (1991) dominannya kepala desa dalam perencanaan program-program pembangunan desa, telah mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa menyebabkan matinya kemandirian politik pembangunan.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Chambers (1995, dalam Kartasasmita, 1996) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*". Konsep ini lebih luas dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya

belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Mas'ood (1993) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya memberi daya atau kekuatan kepada rakyat (*empowerment*). Bentuk, jenis dan cara pemberdayaan masyarakat atau penguatan masyarakat sangat beragam. Menurut Adam Malik (dalam Alfian, 1980) upaya pemberdayaan itu adalah berwujud "adanya kemauan untuk mengubah struktur masyarakat yang selama ini berlaku". Oleh karena itu upaya mengentaskan orang miskin dari kemiskinannya secara hakiki (bersifat mendasar) sama sulitnya dengan usaha memberdayakan masyarakat. Dan bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan bersifat *instant* (segera ada hasilnya).

Menurut Sumodiningrat (1997) strategi pemberdayaan dapat dilakukan dengan :

1. Motivasi masyarakat; yakni adanya suatu proses penciptaan kondisi yang membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat dan ada usaha untuk mengembangkannya.
2. Empowering; yakni memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat dengan memberikan input dan membuka peluang untuk berkembang.
3. Proteksi; yakni memberikan perlindungan agar yang lemah tidak menjadi semakin lemah.

Selain itu pemberdayaan kepada masyarakat harus diikuti pemberdayaan kepada aparat pemerintah sebagai agen pembangunan yang memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat

dalam melaksanakan setiap program pembangunan. Hal-hal yang perlu diperkuat yakni : kemampuan aparat pemerintah sebagai pembina dan pembimbing masyarakat dan lembaga sosial masyarakat. Penguatan lembaga-lembaga sosial masyarakat harus diarahkan untuk dapat menumbuhkan tanggung-jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Peran serta masyarakat di satu daerah berkaitan erat dengan pemahaman tentang potensi daerah, kemampuan untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang dalam pembangunan daerah.

Setidaknya ada dua hal yang dilakukan aparat dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Bahwa peran tidak harus berupaya melakukan sendiri, tetapi mengarahkan. Artinya kalau dilakukan masyarakat maka jangan dilakukan oleh pemerintah.
2. Masyarakat hendaknya diikutsertakan mulai dari proses survei, perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembangunan dan juga proses pengambilan keputusan (Sumodiningrat, 1997).

Peningkatan peranserta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara mendayagunakan mekanisme perencanaan masyarakat di tingkat desa dengan menghidupkan musyawarah yang diperankan oleh masyarakat desa yang dihimpun dalam wadah LKMD. Kartodirjo (1987) mengemukakan bahwa tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena tokoh masyarakat dengan otoritas tradisionalnya mempunyai pengaruh yang efektif dalam pelaksanaan berbagai macam program pembangunan di desa.

2.5 Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa

Pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa merupakan proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa, yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya melibatkan instansi pemerintah, lembaga pemerintah non-departemen dan lembaga kemasyarakatan yang dikordinasikan dalam wadah kelembagaan desa. Oleh karena itu pembangunan desa perlu direncanakan secara partisipatif dan dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan (Dirjen PMD, 1996).

Karena pengelolaan pembangunan desa meliputi berbagai aspek dan keterkaitan dengan banyak pihak, maka tidak dapat dihindari bilamana metode perencanaan partisipatif diperkenalkan di desa dalam banyak jenis. Metode atau perencanaan partisipatif tersebut sangat dipengaruhi oleh masing-masing pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga lainnya, sesuai dengan kepentingannya.

Metode perencanaan partisipatif yang langsung melibatkan peran serta masyarakat telah banyak dikenal. Berikut beberapa metode perencanaan partisipatif.

Metode ZOPP, merupakan perencanaan proyek yang berorientasikan kepada tujuan. ZOPP merupakan singkatan dari *ziel* (tujuan), *orienterte* (berorientasi), *projekt* (proyek) dan *planung* (perencanaan). Metode ZOPP dalam penerapannya, dikenali dari ciri-ciri utamanya yaitu :

- a. adanya kerja kelompok, dilakukan oleh semua pihak terkait,

- b. adanya peragaan, dipaparkan agar semua pihak mengetahui,
- c. adanya kepeemanduan, diperlancar oleh orang tertentu untuk membantu mencapai mufakat.

Perencanaan dengan metode ZOPP mempunyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil perencanaan sangat tergantung pada informasi yang tersedia dan yang diberikan (Dirjen PMD, 1996).

Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dimaksudkan sebagai metode pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa sendiri. Pengertian belajar di sini mempunyai arti luas, karena meliputi juga kegiatan mengkaji, merencanakan dan bertindak. Prinsip kerja metode PRA hampir sama dengan metode ZOPP. Dalam metode ini masyarakat juga dilibatkan secara langsung dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mengutamakan alat kajian, dan adanya pemandu.

Metode PRA tekanannya bukanlah pada kemampuan teknik-teknik PRA dalam partisipasi pengumpulan data, penggunaan alat kajian dan prinsip kepeemanduan. Penekanannya justru pada proses belajar masyarakat dan tujuan teknis untuk pengembangan program. Sebab penerapan metode PRA adalah untuk mendorong masyarakat turut serta meningkatkan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai kehidupan dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat menyusun rencana dan

tindakan. Metode PRA juga bersifat untuk menerima cara-cara baru dan metode baru yang dianggap cocok (Dirjen PMD, 1996).

Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) merupakan metode yang digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat. Pelaksananya dilakukan oleh suatu tim dan dilaksanakannya dalam waktu singkat, sekitar 4 hari sampai 3 minggu. Metode ini dilaksanakan dengan menggali informasi terhadap hal yang telah terjadi, kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung. Semua informasi tersebut diolah oleh tim untuk kemudian diumpunbalikkan kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan.

Metode RRA lebih berfungsi sebagai perencanaan dari penelitian lebih lanjut, atau sebagai pelengkap penelitian yang lain, atau sebagai kaji tindak untuk menyelaraskan antara keinginan masyarakat dan penentu kebijakan (Dirjen PMD, 1996).

Metode Musyawarah Mufakat Pembangunan Desa (MMP-Desa). Metode ini menghasilkan keputusan bersama rencana pembangunan desa yang terdokumentasi dalam laporan MMP-Desa. Hal-hal yang unik dari metode ini adalah dalam mencapai keputusan bersama: tumbuh keterbukaan, dan terlaksana dalam suasana akrab dan gembira.

Selanjutnya Ginting (1990) menyebutkan landasan pemikiran yang mendasari MMP-Desa adalah bahwasannya pengalaman dan juga motivasi pembangunan desa berada di tangan atau dalam diri warga desa sendiri. Kegunaan MMP-Desa dapat dilihat sebagai alat, sebagai garis besar pengarah perjuangan sebagai pencerminan ke arah mana peningkatan hubungan desa dengan 'luar desa' dikembangkan. Manfaat MMP-Desa

selain dapat menghasilkan perencanaan desa, juga dapat menampung aspirasi warga, meningkatkan swadaya dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta kebersamaan di desa.

BAB III

DESKRIPSI DAERAH STUDI

3.1 Geografis Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat terletak di antara $3^{\circ}14'$ - $4^{\circ}13'$ LU dan $97^{\circ}52'$ - $98^{\circ}45'$ BT. Topografi kabupaten ini terbagi menjadi wilayah pesisir pantai (0 - 4 meter dari permukaan laut), dataran rendah (0 - 30 m dpl) dan dataran tinggi (300 - 1200 m dpl). Di sebelah Utara kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan dengan Kabupaten Karo dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara/Tanah Alas.

Kabupaten ini banyak dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara ke Selat Malaka. Sungai Wampu merupakan sungai yang terpanjang yaitu 105 kilometer dengan lebar 100 meter dan areal 2.569 km². Berikutnya adalah sungai Batang serangan dengan panjang 80 kilometer lebar 100 meter dan luas areal sekitar 1.143 km².

Selain dilalui oleh banyak sungai, kabupaten ini juga memiliki wilayah pantai yang luas. Lima kecamatan yang berada di kawasan pantai Selat Malaka yaitu Pangkalan Susu, Berandan Barat, Babalan, Tanjung Pura dan Secanggang. Di samping kelima kecamatan di atas terdapat dua kecamatan lagi yang tidak langsung berbatasan dengan pantai tetapi banyak penduduk mencari nafkah sebagai nelayan.

Kabupaten Langkat masuk ke dalam Wilayah Pembangunan III Sumatera Utara bersama dengan Kabupaten Deli Serdang, Kotamadya Medan, Binjai dan Tebing Tinggi. Di Kabupaten Langkat sendiri terdapat

tiga Wilayah Pembangunan. Wilayah Pembangunan I (Langkat Hulu) meliputi Kecamatan Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Binjai dan Sei Bingai. Wilayah Pembangunan II (Langkat Hilir) meliputi Kecamatan Stabat, Secangang, Hinai, Padang Tualang, dan Tanjung Pura. Wilayah Pembangunan III (Teluk Haru) meliputi kecamatan Gebang, Sei Lapan, Babalan, Berandan Barat, Pangkalan Susu dan Besitang.

Tabel 1 : Jumlah Desa, Penduduk, Luas Dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Di Kabupaten Langkat Tahun 2001

No.	K e c a m a t a n	Desa	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Bahorok	19	42.440	955,10	44
2.	Salapian	22	50.008	469,90	106
3.	Sei. Bingei	15	44.233	338,45	131
4.	Kuala	16	39.830	194,76	205
5.	Selesai	12	57.466	152,08	378
6.	Binjai	7	34.982	49,55	706
7.	Stabat	10	66.928	153,57	436
8.	Wampu	9	37.710	130,82	288
9.	Padang Tualang	9	44.335	739,93	60
10.	Sawit Seberang	4	25.664	443,95	58
11.	Batang Serangan	5	32.924	460,40	72
12.	Hinai	12	47.106	114,88	410
13.	Secangang	14	67.424	248,73	271
14.	Tanjung Pura	16	63.096	165,78	381
15.	Gebang	9	43.798	162,99	269
16.	Babalan	8	53.965	101,80	530
17.	Sei Lapan	10	49.296	306,81	161
18.	Brandan Barat	6	19.769	92,00	215
19.	Besitang	11	49.114	710,48	69
20.	Pangkalan Susu	16	46.812	271,31	173
Kabupaten Langkat		230	916.900	6.263,29	146

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka, 2001

Kabupaten Langkat terdiri atas 20 kecamatan setelah diadakan pemekaran terhadap dua kecamatan pada tahun 1999/2000. Kecamatan Stabat di bagi menjadi dua yaitu Stabat dan Wampu, Kecamatan Padang Tualang dibagi menjadi tiga kecamatan yaitu Padang Tualang, Batang Serangan dan Sawit Seberang. Berdasarkan data Kabupaten Langkat

Dalam Angka 2001, jumlah desa/kelurahan di kabupaten ini sebanyak 230. Kecamatan Salapian merupakan yang terbanyak desa/kelurahannya yaitu 19 desa. Kecamatan Padang Tualang memiliki luas yang paling besar yaitu 955,10 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 42.440 jiwa. Kecamatan terpadat adalah Binjai dengan luas hanya 49,55 Km² sedangkan jumlah penduduknya mencapai 34.532 jiwa. Keadaan ini dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini.

3.2 Perekonomian Kabupaten Langkat

Pendapatan per kapita penduduk kabupaten ini mengalami peningkatan hingga tahun 1997, tetapi tahun 1998 mengalami penurunan sejalan dengan adanya krisis ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari Tabel 2 di bawah ini, di mana PDRB per kapita penduduknya pada tahun 1993 sekitar 1.784.932,74 rupiah meningkat menjadi 2.202.725,57 rupiah di tahun 1997. Tahun 1998 pendapatan per kapitanya menurun sekitar 2,76 persen menjadi 2.141.844,59 rupiah. Tahun 1999 perekonomian juga mengalami penurunan, baru di tahun 2000 dan 2001 mengalami peningkatan menjadi 1.957.966 rupiah.

Tabel 2 : PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Langkat Tahun 1993 - 2001 Atas Dasar Konstan Tahun 1993

Tahun	PDRB (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	PDRB/Kapita (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1993	1.502.913,37	-	1.784.932,74	-
1994	1.634.088,29	8,73	1.921.778,54	7,67
1995	1.719.841,15	5,25	2.003.542,81	4,25
1996	1.848.572,29	7,49	2.135.103,13	6,57
1997	1.921.657,79	3,95	2.202.725,57	3,17
1998	1.882.038,84	-2,06	2.141.844,59	-2,76
1999	1.712.274,75	-9,02	1.910.281,12	-10,81
2000	1.738.876,92	1,55	1.918.094,04	0,41
2001	1.795.258,57	3,24	1.957.965,50	2,08

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka 2001

Tahun 1993 PDRB kabupaten ini sebesar 1.218.239 juta rupiah meningkat menjadi 1.767.454 juta rupiah di tahun 1997. Struktur ekonomi Kabupaten Langkat masih didominasi sektor pertanian diikuti sektor industri. Tahun 1993 sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB sekitar 59,27 persen dan tahun 2001 naik menjadi 65,36 persen. Gambaran ini dapat dilihat dari Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Langkat Tahun 1993 - 2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993

No.	Sektor Ekonomi	Tahun					
		1993	1995	1997	1999	2000	2001
1.	Pertanian	722.040	868.703	1.011.152	1.135.467	1.132.833	1.173.320
2.	Penggalian	808	1.294	1.645	1.763	2.035	2.335
3.	Industri	156.899	192.524	219.458	185.903	186.603	191.876
4.	Utility	4.875	8.138	10.750	11.717	13.545	14.223
5.	Konstruksi	25.475	27.704	30.219	28.768	31.707	31.484
6.	Pedagangan, Hotel & Restoran	140.712	169.219	185.392	155.546	173.848	179.845
7.	Transportasi & Komunikasi	46.254	52.536	60.682	51.023	51.769	52.767
8.	Jasa Keuangan	34.690	45.304	55.216	53.262	54.866	55.541
9.	Jasa Lainnya	86.487	90.819	101.939	85.827	91.500	93.868
PDRB		1.218.239	1.456.240	1.676.454	1.712.275	1.738.707	1.795.259

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka 2001

Sektor kedua dan ketiga ditempati sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tahun 1993 sumbangan sektor industri terhadap PDRB Langkat sekitar 12,88 persen dan di tahun 2001 menjadi 10,69 persen. Demikian pula dengan sektor perdagangan hotel dan restoran di tahun 1993 sekitar 11,56 persen dan tahun 2001 juga menurun menjadi 10,02 persen. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan dalam kontribusi terhadap PDRB antara lain adalah pertambangan dan penggalian, utiliti (listrik, air minum), dan jasa keuangan.

3.2 Kecamatan Berandan Barat

Kecamatan Berandan Barat adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, propinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini berbatasan dengan Selat Malaka di Utara, Kecamatan Babalan dan Sei Lapan di sebelah Timur, Kecamatan Pangkalan Susu dan Besitang di sebelah Barat serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Lapan. Secara geografis berada di 4°04'15" Lintang Utara sampai 4°58'45" LU dan 98°15'20" Bujur Timur sampai 98°18'45" BT. Kecamatan Berandan Barat merupakan bagian dari wilayah pembangunan III (Teluk Haru) Kabupaten Langkat yang terdiri dari 6 desa yaitu : desa Tangkahan Durian, Sei Tualang, Pangkalan Batu, Lubuk Kasih, Perlis dan Lubuk Kertang. Jarak pusat pemerintahan wilayah kecamatan dengan Ibukota Kabupaten 46 Km atau satu jam perjalanan dan dengan Ibukota propinsi berjarak sekitar 89 Km atau 2 jam perjalanan.

Luas wilayah Kecamatan Berandan Barat adalah 9.200 Ha. Dengan jenis penggunaan tanah antara lain adalah untuk sawah, pekarangan, bangunan, emplasemen, tegalan/ kebun, tambak, perkebunan swasta, kuburan dan lain-lain. Distribusi penggunaan lahan yang terbesar adalah untuk tegal/kebun sekitar 25,60 persen, untuk perkebunan swasta sekitar 23,45 persen dan untuk tanah sawah sekitar 16,65 persen. Luas penggunaan lahan untuk tambak sekitar 2,65 persen dan ini berada pada sisi jalur hijau. Secara rinci terlihat dari Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 : Distribusi Penggunaan Lahan Di Kecamatan Berandan Barat Tahun 2001

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	Tanah sawah	1.531,80	16,65
2.	Pekarangan/ Bangunan/ Emplasemen	769,12	8,36
3.	Tegal/ Kebun	2.355,20	25,60
4.	Tambak	243,80	2,65
5.	Perkebunan Swasta	2.157,40	23,45
6.	Lapangan Olah Raga	2,76	0,03
7.	Jalur Hijau	1.502,36	16,33
8.	Kuburan	324,76	3,53
9.	Lain-lain	312,80	3,40
Jumlah		9.200,00	100

Sumber : Monografi Kecamatan Berandan Barat 2001

Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Berandan Barat ini telah cukup baik dan memadai. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan sarana yang telah tersedia dalam kondisi yang baik. Jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 : Sarana dan Prasarana di Kecamatan Berandan Barat Tahun 2001

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
1	Sarana Ibadah	
	▪ Mesjid	14
	▪ Mushola	34
	▪ Gereja	2
	▪ Pura	1
2	Sarana Kesehatan	
	▪ Puskesmas	6
	▪ Pos/klinik KB	2
	▪ Posyandu	18
3	Sarana Pendidikan	
	▪ SD	20
	▪ SLTP	3
	▪ SLTA	-
	▪ Madrasah	1
4	Sarana perekonomian	
▪ KUD	2	

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
	▪ Industri RT	7
	▪ Rumah makan	7
	▪ Toko/warung	197
5	Prasarana pemerintah	
	▪ Balai desa	4
	▪ Kantor desa	6

Sumber : Monografi Kecamatan Berandan Barat 2001

Sarana dan prasarana yang ada meliputi sarana sosial/budaya, kesehatan, perekonomian dan prasarana pemerintah. Sarana kesehatan sangat baik di mana terdapat 6 unit Puskesmas (termasuk pembantu) ditambah klinik dan posyandu. Sarana pendidikan masih kurang karena di kecamatan ini belum terdapat SLTA. Di kecamatan ini terdapat dua unit KUD sebagai sokoguru perekonomian dan banyak terdapat toko/warung yang menyediakan keperluan penduduk sehari-hari.

Jumlah penduduk di Kecamatan Berandan Barat adalah 19.769 jiwa yang terdiri dari 10.152 jiwa laki-laki dan 9.617 jiwa perempuan yang terbagi dalam 3.934 KK.

Tabel 6 : Distribusi Penduduk Kecamatan Berandan Barat Menurut Kelompok Umur Tahun 2001

No.	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0-6	2.901	14,67
2.	7-12	3.075	15,55
3.	13-18	3.261	16,50
4.	19-24	2.032	10,28
5.	25-55	7.802	39,47
6.	56-79	691	3,50
7.	80 tahun ke atas	7	0,04
Jumlah		19.769	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Berandan Barat 2001

Dari Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa penduduk kecamatan Berandan Barat kelompok umur 25-55 tahun memiliki proporsi yang paling besar yaitu sekitar 39,47 persen diikuti kelompok umur 13-18 tahun sekitar 16,50 persen. Sedangkan kelompok umur 80 tahun ke atas memiliki jumlah penduduk yang terkecil yaitu sekitar 0,04 persen.

Tabel 7 : Distribusi Penduduk Kecamatan Berandan Barat Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2001

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	2.932	14,83
2.	Tidak Tamat Sekolah	2.299	11,62
3.	Tamat SD	8.610	43,54
4.	Tamat SLTP	3.664	18,53
5.	Tamat SLTA	2.185	11,05
6.	Tamat Akademi	42	0,21
7.	Tamat PT	44	0,22
Jumlah		19.369	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Berandan Barat 2001

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Berandan Barat masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk hanya mengecap tingkat pendidikan sampai tamat Sekolah Dasar yaitu sekitar 43,68 persen, tamat SLTP sekitar 18,84 persen. Penduduk yang menamatkan pendidikan lanjutan, akademi dan perguruan tinggi, hanya sekitar 0,43 persen. Dengan demikian secara kualitas, sumberdaya manusia di kecamatan ini masih kurang.

Tabel 8 : Distribusi Penduduk Kecamatan Berandan Barat Menurut Agama Yang Dianut Tahun 2001

No.	Agama	Jumlah(jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	19195	97,06
2	Katolik	8	0,04
3	Protestan	506	2,56
4	Budha	69	0,35
Jumlah		19.776	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Berandan Barat 2001

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Berandan Barat memeluk agama Islam yaitu sekitar 97,06 persen, Protestan sekitar 2,56 persen, Katolik sekitar 0,04 persen dan Budha sekitar 0,35 persen seperti yang terlihat pada Tabel 8.

Tabel 9 : Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Berandan Barat Tahun 2001

No.	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	- Petani Pemilik Tanah	2.031	22,35
	- Penggarap	204	2,24
	- Buruh Tani	222	2,44
2.	Nelayan	2.221	24,44
3.	Buruh Bagunan	125	1,38
4.	Buruh Tambang	120	1,32
5.	Buruh Perkebunan	2.074	22,82
6.	Pedagang	204	2,24
7.	Pengangkutan	155	1,71
8.	PNS	114	1,25
9.	Peternak	1.617	17,79
Jumlah		9.087	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Berandan Barat 2001

Secara rinci pada Tabel 9 dapat dilihat tentang mata pencaharian penduduk. Mata pencarian utama penduduk Kecamatan Berandan Barat adalah sebagai nelayan yaitu sekitar 24,44 persen. Selain banyak juga

yang bekerja menjadi buruh perkebunan sekitar 22,82 persen, sebagai petani pemilik tanah sekitar 22,35 persen dan yang terkecil adalah menjadi PNS sekitar 1,25 persen.

BAB IV

DINAMIKA KELOMPOK MASYARAKAT

4.1 Potensi Kelompok Masyarakat

Sudah menjadi pengetahuan umum sejak lama, bahwa karakteristik budaya masyarakat pedesaan di Indonesia sangat beragam. Fenomena yang sama bahkan juga ditemui di Kabupaten Langkat yang secara sekilas memiliki satu kebudayaan, yakni budaya Melayu.

Dalam kenyataannya, pengaruh pembangunan dan modernisasi di pedesaan Langkat telah menyebabkan munculnya diferensiasi mata pencaharian penduduk pada tingkat desa. Namun demikian, istilah di atas tetap relevan dipakai untuk menunjukkan bahwa di desa pantai.

Menurut pengamatan, nelayan di desa ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan petani pada umumnya. Pendapatan mereka bersifat *daily increments*, jumlahnya sulit ditentukan, sangat tergantung pada musim dan status nelayan. Selain itu produk mereka lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan makanan pokok, mudah rusak, dan harus segera dipasarkan, sehingga menimbulkan ketergantungan mereka pada pedagang atau toke. Dalam hubungan dengan pemilik kapal, mereka cenderung dirugikan. Kehidupan mereka diliputi oleh kerentanan karena ketergantungan yang sangat besar pada satu mata pencaharian, yaitu menangkap ikan.

4.2 Keberadaan Kelompok Masyarakat

Kelompok pada hakekatnya adalah kesatuan kolektif yang merupakan unsur dari masyarakat. Sebagai suatu unsur masyarakat, kelompok memiliki karakteristik dasar yang mengikat semua anggotanya, seperti sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas sosial. Selain karakteristik dasar tersebut, kelompok memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari unsur masyarakat lainnya yaitu organisasi dan sistem kepemimpinan (Koentjaraningrat, 1987).

Kelompok biasanya terdiri atas kumpulan dari orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang sama. Oleh sebab itu para anggota kelompok biasanya juga merasa saling membutuhkan. Dalam keadaan yang semakin maju dan modern, kelompok-kelompok tersebut dapat berkembang sesuai dengan kepentingan mereka sehingga menjadi semakin beragam.

Masyarakat di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat juga memiliki kelompok-kelompok semacam ini, baik kelompok dengan tujuannya mencari keuntungan, kelompok yang bersifat sosial, ataupun kelompok yang bersifat keagamaan. Dilihat dari proses kemunculannya, kelompok-kelompok tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yakni kelompok yang muncul atas inisiatif masyarakat sendiri, kelompok yang muncul atas dorongan masyarakat setempat, dan kelompok yang muncul karena dibentuk pemerintah.

Kelompok-kelompok di desa ini yang muncul atas bentukan pemerintah, yakni kepala desa melalui kepala dusun masing-masing

seperti kelompok masyarakat Delima dan Mawar. Kelompok ini berdiri tahun 1999 dan sampai saat ini masih berjalan. Anggotanya meliputi nelayan yang mengusahakan ikan asin dan terasi dengan jumlah anggota masing-masing 20 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah ideal apabila dikaitkan dengan kekompakan sebuah kelompok. Menurut Slamet (1978), jumlah anggota kelompok yang terlalu besar akan mengurangi kekompakan kelompok, dan semakin kecil jumlah anggota itu maka kelompok akan semakin kompak.

Kekompakan hayalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menilai dinamika kelompok. Slamet (1978) menyatakan masih ada faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk menilai dinamika kelompok suatu kelompok. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah keefektifan kelompok, yang dinilai melalui tiga hal. Pertama, output dari kelompok itu sesuai dengan tujuan atau tidak; kedua, moral kelompok (antusiasisme) cukup tinggi atau tidak; dan ketiga, anggota cukup puas terhadap hasil atau tidak.

Apabila kelompok masyarakat Delima dinilai dari tiga hal tersebut nampak bahwa kelompok tersebut tidak dinamis. Hal ini terlihat dari apa yang dihasilkan oleh kelompok, seperti produksi yang tidak stabil dan masih sangat tergantung kepada musim, dan penghasilan yang diperoleh tidak dapat memupuk modal. Juga dalam hal pengembalian dana bergulir, tidak sepenuhnya bantuan pinjaman yang diberikan mampu mereka lunasi, sehingga tidak bergulir ke kelompok masyarakat yang lain. Kepuasan anggota kelompok tidak merata, karena sebagian jumlah bantuan yang mereka terima tidak sama besarnya padahal kegiatan usahanya sama dan pemungutan cicilan juga tidak merata.

4.3 Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan

Satu hal yang penting sekali sifatnya dalam hubungannya dengan dinamika kelompok adalah bagaimana menjamin kelangsungan kelompok tersebut sehingga dapat semakin memberikan manfaat bagi para anggotanya. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga kelangsungan kelompok tersebut jauh lebih sulit dibandingkan dengan membentuknya.

Dari berbagai kelompok tersebut di atas, kelompok pengajian merupakan kelompok yang relatif berhasil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Meskipun demikian keberhasilan ini hanya dilihat dari segi jumlah anggotanya yang terbanyak dan kegiatannya yang masih terus berlangsung dan beberapa kegiatan akan dikembangkan. Selain itu kelompok nelayan, meskipun banyak anggotanya yang merasa kecewa kepada pengurus kelompok ini, namun merupakan kelompok yang cukup banyak anggotanya dan masih menyelenggarakan kegiatan pertemuan rutin. Sedangkan kelompok-kelompok lainnya, seperti kelompok PKK, kelompok Karang Taruna dan kelompok pemuda, hanya tinggal namanya saja karena tidak pernah mengadakan kegiatannya lagi.

Perkembangan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kelompok tidak cukup hanya didasarkan motif atau kemauan kelompok saja. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Gerungan (1987) bahwa untuk mencapai tujuan kelompok, maka motif yang sama (motif berkelompok) tersebut harus disertai dengan keinsyafan anggota kelompok bahwa tujuan-tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan kerjasama di antara mereka. Tanpa adanya keinsyafan

ini, maka tujuan yang sama dari kelompok akan dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing anggota kelompok. Dalam kasus kelompok nelayan nampak adanya kecenderungan ke arah ini. Kelompok ini tidak mampu memberikan manfaat secara merata bagi anggota-anggotanya, karena masing-masing anggota cenderung mementingkan diri sendiri. Akibat selanjutnya kelompok tidak mampu meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang menjadi anggotanya.

4.4 Kebijakan Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Nelayan

Nelayan tradisional umumnya memiliki alat tangkap ikan yang sederhana (jaring dan pancing) yang tidak begitu produktif. Alat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena potensi laut menghendaki jenis peralatan lain yang lebih efektif atau peralatan modern yang lebih "*capital intensive*".

Mereka yang bekerja sebagai buruh nelayan penghasilannya tidak memuaskan, karena posisi mereka yang lemah dalam negosiasi penetapan upah/pembagian hasil dengan majikan mereka pengusaha ekonomi kuat. Namun demikian penghasilan mereka relatif lebih stabil dibandingkan dengan nelayan tradisional.

Untuk meningkatkan penghasilan masyarakat setempat usaha yang perlu dilakukan adalah dengan menciptakan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk mereka, baik langsung untuk kepala keluarga ataupun untuk anggota keluarga mereka (ibu rumah tangga ataupun anak). Sehingga mereka mempunyai pendapatan pokok dan sampingan yang menunjang pendapatan keluarga.

Untuk menciptakan tambahan penghasilan warga setempat langkah-langkah yang sudah dirintis oleh Dinas Perindustrian Sumatera Utara merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan mengadakan pelatihan dan bantuan peralatan kepada warga tentang aspek teknik pembuatan tepung ikan. Hal ini disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang tersedia baik dalam jumlah, kualitas dan minat mereka. Namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pembinaan lanjutan dan tidak adanya mitra usaha yang dapat memberi akses kepada mereka menuju pasar yang lebih luas.

Dalam mencari mitra usaha salah satu hal yang penting diperhatikan adalah pengusaha-pengusaha tersebut selain memiliki modal, juga mampu untuk memasarkan komoditinya dengan baik dan kontinu terutama dengan adanya perluasan usaha di desa ini. Lembaga swadaya masyarakat perlu membantu dalam menganalisis prospek usaha tersebut termasuk aspek pemasaran dan finansial serta merekomendasikan cara-cara untuk memperoleh tambahan bagi pengusaha yang bersangkutan jika memang layak dikembangkan.

Untuk nelayan pemilik perlu dikaji alternatif bentuk alat tangkap yang paling efektif serta tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Masalah yang terlalu rumit mengenai hal ini adalah kesediaan para penyandang dana untuk membiayai usaha yang dilihat dari berbagai aspek mungkin layak, namun dilihat dari jaminan (*collateral*) sangat lemah. Perlu dipikirkan bagaimana bentuk usaha yang paling sesuai dan dari mana sumber dana diperoleh.

Kegiatan-kegiatan bisnis lain yang perlu dikembangkan adalah usaha-usaha pengolahan ikan seperti ikan asin (cerbung), ikan teri, perebusan ikan dan pembuatan terasi. Untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil laut yang tidak bisa langsung dijual dalam bentuk segar dengan harga wajar pada saat-saat terjadi "*over supply*". Kegiatan ini juga akan menimbulkan banyak peluang kerja dan dapat meningkatkan penghasilan warga setempat.

Usaha-usaha peternakan kecil terutama unggas (ayam dan itik) perlu dikaji kemungkinannya. Usaha-usaha ini tidak memerlukan modal yang besar dan dapat dilakukan sebagai usaha sampingan, namun kegiatan ini perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan. Pada waktu sekitar 10 tahun yang lalu, Desa Perlis terkenal sebagai penghasil telur itik terbesar di kawasan Teluk Haru, namun dengan adanya krisis ekonomi mendorong meningkatnya harga pakan tambahan. Akibatnya banyak usaha ternak itik yang tutup karena biaya operasional yang tinggi dibandingkan dengan harga jual. Saat ini kegiatan peternakan dapat dikembangkan dengan memperkuat usaha pembuatan pakan ternak dari sisa ikan tangkapan yang mudah didapatkan di sekitar desa dan mengurangi ketergantungan kepada industri pakan.

Seperti pernyataan para nelayan yang memiliki keinginan beralih usaha, maka paling banyak adalah ingin membuat usaha dagang. Pengembangan usaha perdagangan, khususnya dagang eceran untuk barang-barang konsumsi kebutuhan sehari-hari di Desa Perlis peluangnya perlu dikaji dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Idealnya, jika ada koperasi konsumsi di desa ini, maka usaha perdagangan eceran dapat dilaksanakan oleh koperasi, dan anggotanya mendapatkan manfaat dari koperasi tersebut. Di samping penyediaan barang-barang konsumsi, kegiatan koperasi dapat diperluas dengan kegiatan simpan pinjam. Namun hal itu tergantung kepada kesiapan untuk mendirikan koperasi dengan manajemen yang baik. Saat ini koperasi yang siap melaksanakan kegiatan tersebut belum ada sehingga perlu dikaji kemungkinan pendiriannya. Namun seandainya didirikan, tentunya akan mengurangi potensi peningkatan usaha dagang yang sudah ada selama ini, jika barang yang diperdagangkan sama.

Alternatif lain untuk memobilisir dana masyarakat adalah membentuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Lembaga seperti ini sangat penting artinya untuk memupuk masyarakat setempat khususnya untuk menabung sehingga menunjang kelancaran kegiatan bisnis masyarakat termasuk kelancaran pengembalian pinjaman. Selain itu juga mampu memutus siklus ketergantungan masyarakat terhadap para rentenir.

Walaupun sepintas lalu kelihatannya gagasan-gagasan di atas sederhana, namun sesungguhnya sangat kompleks. Karena itu perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai kelayakan masing-masing proyek dari sudut sumberdaya manusia yang tersedia, organisasi dan manajemen, teknik produksi, keuangan, lingkungan baik fisik maupun sosial dan lain-lain.

Terbatasnya sumber daya manusia khususnya ditinjau dari segi kualitas mengakibatkan kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat memberikan implikasi sekaligus dalam sekejap. Perlu perencanaan yang

terpadu mengenai kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang mutlak harus dilakukan adalah pelatihan-pelatihan keterampilan sebelum memasuki tahap implementasi. Pelatihan perlu dilakukan secara intensif agar calon pelaksana menguasai teknik produksi, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dipasarkan. Sebelum pelatihan perlu dilakukan penyaringan minat dan bakat sesuai dengan kegiatan usaha yang dikembangkan. Pembiayaan untuk pelatihan merupakan *human investment* yang sedapat mungkin didapatkan dari program-program dinas-dinas terkait.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil studi yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat diambil beberapa kesimpulan:

1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi kemiskinan nelayan di Desa Perlis adalah rendahnya pendidikan yang diperoleh, kurangnya minat mengikuti kursus ketrampilan, rendahnya pengetahuan tentang ilmu perikanan, keterbatasan alat tangkap dan kurangnya budaya menabung.
2. Potensi yang dimiliki oleh Desa Perlis untuk mengatasi kemiskinan adalah tersedianya sumber bahan baku untuk usaha kecil pengolahan hasil ikan, sudah terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat (pokmas), dan adanya perhatian pemerintah dengan memberikan latihan keterampilan, serta tersedianya lahan untuk pengembangan tambak udang.
3. Kebijakan yang dapat harus ditempuh pemerintah adalah yang langsung melibatkan masyarakat sebagai *stake holder* dengan mencarikan mitra usaha atau bapak angkat sehingga produksi yang dihasilkan dapat dipasarkan, serta kontinuitasnya terjamin. Pembentukan lembaga keuangan tingkat desa dapat mengurangi kendala modal yang selama ini mereka hadapi. Pembinaan yang

baik juga dibutuhkan oleh mereka dan bukan hanya pelatihan sesaat.

5.2 Rekomendasi

Kepada Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait sudah saatnya memperhatikan secara lebih serius tentang kemiskinan masyarakat pesisir dan bukan sekedar menjadi wacana serta pelaksanaan proyek semata. Perlu mengajak investor untuk mendirikan usaha yang berkaitan dengan pengolahan hasil-hasil laut, seperti pembuatan terasi, tepung ikan, dan pakan ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, dkk, 1980. *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan HIPIS, Jakarta.
- Alfitri, 1993. *Kepemimpinan dan Struktur Kekuasaan Lokal Dalam Pembangunan*, Tesis Magister, PPS-UGM, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1995. *Ekonomi Pembangunan*, S PTE-YKPN, Yogyakarta.
- Bryant, Coralie dan Louise White, 1982. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Chambers, Robert, 1983. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, LP3ES, Jakarta.
- Darus, Bahauddin, 1997. *Pembangunan Desa Pantai Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Agribisnis, Fakultas Ekonomi USU, Medan.
- Dirjen PMD Depdagri, 1996. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, Jakarta.
- Ginting, Meneth, 1990. *Idaman dan Harapan Masyarakat Karo*, USU-Press, Medan.
- Hadjisaroso, 1994. "Konsep Dasar Pengembangan Wilayah Di Indonesia" dalam Prisma No. 8 Agustus, Jakarta.
- Hanafiah, T., 1982. *Pendekatan Wilayah dan Pemabngunan Pedesaan*, Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Haq, Mahbub, 1993. *Tiari Kemiskinan, Tantangan-tantangan Untuk Dunia Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Inayatullah, 1997. "Rural Oragnization and Rural Development, Some Asian Experience", dalam Mubyarto, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yoyakarta.
- Irawan dan Suparmoko, 1987. *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.
- Ismawan, Bambang dan Kartjono, 1992. "Kemandirian Kelompok Swadaya dan Peranannya Dalam Menciptakan Peluang Kerja dan

- Berusaha Di Pedesaan, dalam Mubyarto (Ed), *Peluang Kerja dan Berusaha Di Pedesaan*, BPFE, Yogyakarta.
- Jayadinata, Johara T., 1992. *Tataguna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB, Bandung.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.
- Kartodirjo, Sartono, 1987. *Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong Royong dan Perkembangan Masyarakat Indonesia*, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1987. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta.
- Raharjo, Dawam M., 1992. "Keswadayaan Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi" dalam *Pengembangan Swadaya Nasional : Tinjauan Ke Arah Persepsi Utuh*, LP3ES, Jakarta.
- Sandy, I Made, 1982. *Pembangunan Wilayah*, Monograf Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Saptarini, Dian, 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Wilayah Pesisir*, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Jakarta.
- Soedjito, 1987. *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, Bayu Grafika, Yogyakarta.
- Soehardi, 1985. "Pengembangan Lingkungan Wilayah Pantai" dalam *Pola Ilmiah Pokok Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Soetrisno, L., 1991. *Proses Melemahnya Demokratisasi Pedesaan dan Kemandirian Masyarakat Desa Di Indonesia*, Makalah pada Seminar Pembangunan dan Kemandirian Masyarakat Desa, PAU Studi Sosial Budaya UGM, Yogyakarta.
- Subhilhar, 1996. "Pembangunan Daerah, Sentralisasi dan Desentralisasi" dalam *Wawasan No. 4*, Januari, Medan.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.

- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993. *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, makalah Seminar P3PK-UGM, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P., 1998. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Ke-3, Erlangga, Jakarta.